

## Bambang Wuryanto Pimpin PA GMNI Jateng



KR-Budiono

### Bambang Wuryanto

**SEMARANG (KR)** - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Jateng Bambang Wuryanto atau yang akrab di sapa Bambang Pacul, terpilih menjadi Ketua Persaudaraan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jateng periode 2021-2026. Bambang Pacul terpilih secara aklamasi pada Konferensi Daerah (Konferda) PA GMNI ke-4 Jateng. Dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua Sidang I Gede Ananta Wijaya Putra di Hotel Patra & Convention Semarang, Selasa (23/3), Bambang Pacul ditetapkan sebagai Ketua PA GMNI secara aklamasi.

Terpilihnya Bambang Pacul yang juga selaku Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, merupakan hasil rekomendasi dan suara dari grassroot. Meski sebelumnya muncul beberapa nama yang digadagadangi akan mencalonkan maupun dicalonkan, namun forum secara bulat menyepakati Bambang Pacul untuk diberi amanah memimpin PA GMNI Jateng. Ketua PA GMNI demisioner Sri Hardjanta mengatakan, agenda Konferda diisi beberapa pleno. Hari pertama dibahas tiga pleno. Pleno pertama pengesahan jadwal, peserta dan tata tertib, dan pemilihan pimpinan sidang. Pleno kedua dengan agenda laporan pertanggungjawaban, pandangan umum DPC, pembentukan komisi. (Bdi)



KR-Sri Warsiti

**UNIVERSITAS Widya Dharma (Unwidha) Klaten melakukan pengukuhan dan penyerahan sertifikat pendidik guru profesional Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan, tahun 2019/2020, Selasa (23/3). Rektor Unwidha Prof Dr Triyono MPd dan Wakil Rektor I Dr Purwo Haryono MHum mengemukakan, jumlah lulusan PPG tahun 2019 dan 2020 sebanyak 70 orang guru profesional terdiri guru profesional bidang studi matematika sebanyak 19 orang dan bidang studi PPKN sebanyak 51 orang.**

## KAPOLRES GROBOGAN SERAHKAN BANTUAN BIBIT LELE

# Ciptakan Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19

**GROBOGAN (KR)** - Dalam rangka menciptakan ketahanan pangan selama pandemi Covid-19, Selasa (23/3) dilaksanakan kegiatan penyerahan 10.000 bibit lele kepada Kelompok Jamu Gendong di Desa Sindurejo RT 09/RW 04 Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan.

Bantuan diserahkan oleh Kapolres Grobogan AKBP Jury Leonard Siahaan SIK MH kepada Ketua Kelompok Jamu Gendong Sindurejo.

Selanjutnya dilakukan pennebaran bibit lele di kolam pembibitan milik kelompok.

AKBP Jury Leonard Siahaan berharap panen ikan lele dua bulan mendatang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan oleh Kelompok Jamu Gendong, sekaligus diharapkan bibit ikan lele itu bisa ber-

kembang dan bisa dipanen sesuai harapan.

Dengan demikian, panen lele bisa mewujudkan ketahanan pangan selama pandemi Covid-19.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Waka Polres Grobogan Kompol Samsu Wirman SH MH SIK, Kabag Ops Kompol Sugiyanto SH, Kasat Intelkam AKP Susilo Kalisrubiono SH, Kasat Lantas AKP Martini SH MH, Kasat Sabhara AKP Haryono SH, Kasi Propram Iptu Sutarja SH, Plt Camat Toroh Drs Kasan Anwar MM, Danramil Toroh Kapten Inf Sukardi, Kapoksek Toroh AKP Darmono SH, Waka Polsek Toroh Iptu Purwadi SH, dan Kepala Desa Sindurejo Tejo Mulyo.

AKBP Jury Leonard menyampaikan pihaknya meminta masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan (prokes) sebagai-

mana dianjurkan pemerintah, yakni dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan.

Terkait hal itu, pada saat

penyerahan bibit lele, juga dilaksanakan dengan memperhatikan prokes yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona.

"Semua pihak saat ini ber-

kewajiban turut mencegah penyebaran virus corona yang nyata-nyata mengancam keselamatan jiwa," jelas AKBP Jury Leonard.

(Tas)



KR-Istimewa

**Kapolres Grobogan AKBP Jury Leonard Siahaan SIK MH secara simbolis menyerahkan bantuan bibit lele.**

# Tinggi, Kerawanan Bencana Banjir dan Abrasi

**SEMARANG (KR)** - Forum Doktor Unissula (FDU) mengadakan webinar solusi komprehensif atasi banjir dan rob di pantura Jateng dan Kota Semarang dengan menghadirkan keynote speaker Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, Rabu (24/3).

Basoeki mengingatkan Indonesia memiliki kerawanan tinggi tertimpa bencana alam. Selama tahun 2020 telah terjadi lebih dari 2.900 bencana alam yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi 1.065 berupa bencana banjir mengakibatkan 370 orang meninggal dunia.

Selain itu, juga menyebabkan kerugian materi antara lain lebih dari 40.000 rumah dan berbagai fasilitas umum lainnya ru-

sak.

"Berdasarkan statistik selama Januari hingga Maret tahun 2021 ini telah terjadi 367 bencana banjir dan 12 gelombang pasang/abrasi. Tahun 2020 terjadi 1.070 kejadian banjir dan 36 gelombang pasang/abrasi. Sementara sepanjang 2019 terjadi 757 bencana banjir dan 18 gelombang pasang/abrasi. Jika kita lihat trennya cukup mengawatirkan oleh karenanya kita harus me-

ngelola ini secara cermat," ungkap Basoeki yang pernah meraih penghargaan "The Best Minister" pada tahun 2020.

Basoeki menambahkan secara teknis konsep penanganan banjir bisa dilakukan dengan tiga hal. Pertama, menahan di hulu dengan program penghijauan, pengendalian sedimen, membangun bendungan. Kedua, mengatur di tengah, dengan meningkatkan tampungan/nor-



KR-Sugeng Irianto

### Basoeki Hadimoeljono.

malisasi sungai/ kolam retensi, penataan drainase, dan pengalihan aliran sungai. Ketiga, menahan dan mengatur di hilir dengan mencegah air laut

masuk ke daratan dengan tanggul, pengendalian sedimen dengan pengerukan sungai, penataan drainase, membangun tampungan air/waduk retensi/normalisasi sungai, dan sistem pompa/polder/pintu air.

Keynote speaker lainnya yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan nara sumber antara lain Muhammad Adek Rizaldi ST MTech (Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana), Prof Imam Wahyudi (Fakultas Teknik Unissula), dan Hendrar Prihadi (Walikota Semarang). (Sgi)

## Kian Kuat,

Menurut Yeka, menegaskan bahwa impor beras bukan sepenuhnya dibatalkan namun ditunda. Namun Yeka menambahkan persoalan beras tidak hanya soal impor. "Karena kami melihat kebijakan impor beras dan tata kelola stok pangan Indonesia masih menyisakan beberapa permasalahan yang berpotensi mengganggu malaadministrasi di dalamnya,"

ujarnya.

Selain itu juga meminta Bulog untuk meningkatkan serapan hingga percepat penggilingan gabah. Sedangkan pengusaha meminta percepat penggilingan gabah dan memastikan hasilnya sesuai persyaratan pengadaan Bulog. "Kami juga meminta pedagang untuk tidak melakukan upaya spekulasi dalam masa tunggu,

karena kita menunggu sampai musim panen, jadi jangan ada spekulasi, karena pemerintah bisa sewaktu-waktu mengambil keputusan alternatif," paparnya.

Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta Billy Haryanto mengusulkan agar rencana impor beras tidak dilaksanakan tepat saat panen raya. (Jon/Ant)-f

## Sambungan hal 1

## Kedaulatan

Importasi korporat memang sakti: berindung diri dalam aneka kepentingan lewat beragam lini: utamanya politisi dan birokrasi. Mudah sekali. Apa yang sudah langka dimanipulasi untuk importasi. Importasi itu pun dilakukan tetapi dengan sikap *wait and see* menunggu waktu, *buying time* menanti harga makin tinggi. Itu terjadi dalam urusan jagung tempoh hari. Padahal, kelambatan importasi itu bakal mendatangkan barang pada saat panen raya jagung. Kedelai juga setali tiga uang: *sami mawon*. Harga sudah beranjak naik tetapi tidak kunjung ada aksi, apalagi operasi pasar. Pengaruh impor juga tidak kunjung efektif karena tidak kunjung masuk pasar. Menunggu waktu tepat, menunggu perajin tahu-tempe *gregeten*.

Beras tidak pernah tanpa problematika. Satu lembaga menyatakan cadangan cukup dan optimis akan panen raya. Pejabat tinggi lain memutuskan impor karena datanya tentang potensi kelangkaan. Kembali soal data dan pemaknaan: kelangkaan atau pelangkaan. Inteligensi pasar, itu mudah. Sebe-

tulnya membangun data untuk disebut pura-pura kelangkaan pasar: mudah sekali. Bayangkan saja, kalau kita punya uang berlimpah dan salak Sleman kita borong semua, buang ke laut: sudah pasti harga salak di Pasar Gedhe langsung melonjak dan disebut kelangkaan pasar. Padahal itu pelangkaan. Andaikata kita mau main-main pelangkaan, sungguh itu mudah sekali dilakukan.

Akan tetapi kuncinya adalah data. Realitasnya hanya satu saja. Tetapi, kejadian yang sama bisa dibaca aneka warna, dan dimainkan dengan berbagai kepentingan. Itulah faktanya. Kebenaran data dan informasi inilah yang harus ditata sampai menghindari multitafsir. Multitafsir tidak terlalu membahayakan kalau tidak disengaja. Tetapi yang banyak, dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan jangka pendek, sungguh teramat membahayakan. Terlebih ketika datanya *plintiran*.

Cadangan banyak tidak terbacca, panen raya tidak dilihat. Tidak ada potensi kelangkaan dianggap langka; potensial

menzalimi jutaan rakyat tani miskin (RTM) tidak disadari. Semuanya tidak diapresiasi. Semuanya kalah dengan sulapan pasar akibat kepentingan modal yang mewajibkan importasi. Kacau!

Benar sekali UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja memandatkan bahwa importasi diatur pemerintah. Begitu pula amanat UU No 18/2012 tentang Pangan dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tetapi benarkah begitu caranya? Dengan mempertontonkan *ceblang-ceblung* antarejabat negara dan main-main dengan data masing-masing?

Rakyat banyak beserta RTM yang menyaksikan dalam keseharian hidupnya yang terbebani dengan Pandemi Covid-19 masih juga harus *ngelus dhadha*, prihatin mendalam dengan polemik elite yang zalim dan tanpa tatakrama. Atau Bangsa ini memang sudah menggeser semangat Kedaulatan Pangan Indonesia menjadi Kedaulatan Importasi? (Penulis adalah Guru Besar Agribisnis UGM dan Wakil Ketua Umum PBNUI)-d

## Sambungan hal 1

## Unik,

"Memungkinkan ke depan dapat terjadi guguran dari awan panas ke arah Kali Gendol," katanya.

Dengan demikian, selain ke arah barat daya, guguran lava dan awan panas berpotensi terjadi di hulu Kali Gendol yang merupakan bukaan

## Sambungan hal 1

kawah saat ini. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km dan pada sektor tenggara yaitu Sungai Gendol sejauh 3 km. (Dev)-d

## Disiapkan,

tetapi juga harus memperhatikan kebijakan Pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Kita harus hati-hati, karena menyangkut penanganan Covid-19 ini yang harus diutamakan, kalau bisa kasus positif harus diturunkan lagi," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ketentuan terkait libur dan mudik Lebaran 2021 akan diputuskan Pemerintah sebelum bulan Ramadan nanti. "Soal mudik Lebaran itu belum kami putuskan, nanti saya kira tidak lama lagi, menjelang puasa itu nanti akan ada keputusan," kata Wapres.

## Sambungan hal 1

Pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah dampak, baik dari sektor ekonomi maupun kesehatan, dari kebijakan apakah mudik Lebaran 2021 boleh dilakukan atau tidak.

"Prinsipnya, yang akan kami pertimbangkan itu dampaknya akan seberapa jauh, kalau diizinkan dan kalau dilarang mudik, juga dampak pada peningkatan penularannya," ujarnya.

Pemerintah akan dengan tegas melarang masyarakat untuk mudik Lebaran apabila hal itu berdampak pada penularan dan peningkatan angka kasus Covid-19 di Indonesia. (Ant)-d

## Penanggulangan

pandemi Covid-19," tandas Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin pada puncak Peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia (HTBS) Tahun 2021 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (24/3).

Bahkan, menurut Wapres, upaya mengatasi TBC dalam kondisi pandemi Covid-19 justru harus semakin ditingkatkan. Alasannya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperkirakan angka kematian akibat TBC bakal meningkat apabila layanan penanganan TBC terganggu akibat pandemi Covid-19.

## Sambungan hal 1

"Sesuai perkiraan WHO, kematian akibat TBC akan bertambah sejumlah 400.000 di seluruh dunia, atau setiap jam bertambah sekitar 46 orang meninggal, jika kelangsungan layanan TBC esensial terganggu selama pandemi Covid-19," katanya.

Salah satu faktor yang paling berdampak pandemi, menurut Wapres, adalah sistem pengumpulan dan pelaporan data kasus TBC. Hal ini berdasarkan laporan WHO tahun 2020, bahwa data pelaporan kasus TBC di lebih dari 200 negara menunjukkan penurunan signifikan. (Sim)-d

# Menilik Siaran Langsung Pernikahan Atta-Aurel, Frekuensi Publik Apakah Diperuntukan Kepentingan Publik?



**W.K. Natalia, M.I. Kom**  
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas AMIKOM Yogyakarta

Rangkaian pernikahan selebritas Aurel Hermansyah bersama Atta halliinter salah satu youtuber tanah air yang disiarkan langsung oleh stasiun RCTI beberapa minggu lalu menuai kritik dari kalangan masyarakat bahkan anggota DPR. Tidak tanggung-tanggung, siaran langsung tersebut dimulai dari prosesi

lamaran, siraman, hingga rencana prosesi akad pada April mendatang.

Siaran langsung pernikahan selebritas yang ditayangkan oleh stasiun televisi ini bukan kali pertama, tahun 2014 RCTI dan Trans TV mendapat teguran tertulis dari KPI karena menayangkan siaran langsung pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama kurang lebih 7 jam.

Pembajakan frekuensi publik untuk kepentingan pihak tertentu ini membuktikan sekali lagi bahwa lembaga penyiaran di Indonesia masih memementingkan rating daripada fungsi media penyiaran untuk kepentingan publik sebagaimana amanat dalam undang-undang penyiaran. Sebagai sumber kekayaan alam terbatas sebuah bangsa, seperti yang tertuang



dalam mukadimah undang-undang penyiaran tahun 32 tahun 2002, keberadaan air, tanah, dan udara, spektrum frekuensi harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Agar penggunaan frekuensi publik ini adil dan bermanfaat dibutuhkan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi program yang disiarkan oleh televisi. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam P3SPS Atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Salah satunya Pasal 11 di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran yang menyebutkan bahwa, "Lembaga

Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik."

Selain itu, ada juga aturan Standar Program Siaran, khususnya di Pasal 13 Ayat 2, yang menyatakan: "Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik." Regulasi yang tertuang dalam P3SPS tersebut sangat gamblang menyebutkan bahwa frekuensi publik seharusnya digunakan untuk kepentingan publik. Secara substansi jika tayangan yang disiarkan televisi tidak mewakili kepentingan publik hanya mewakili kelompok tertentu, KPI bisa menindak tegas stasiun televisi tersebut. Peran KPI Setelah menuai

kritik dari berbagai pihak termasuk laporan dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) yang ditayangkan di RCTI ke KPI, pada Sabtu 13 Maret 2021 lalu. KPI akhirnya memberikan peringatan keras terhadap RCTI, dilansir dari laman KPI ada 5 poin yang disampaikan KPI kepada stasiun RCTI, 5 poin tersebut secara umum menyatakan bahwa siaran langsung pernikahan artis yang bersifat privat tersebut tidak mengandung nilai edukasi kepada publik dalam hal ini pemirsas televisi. Meskipun pihak stasiun RCTI yang hadir dalam mediasi dengan KPI berdalih bahwa tayangan siaran langsung lamaran dan siraman tersebut mengandung unsur budaya yang mewakili keberagaman Indonesia. Telepas pada akhirnya KPI memberikan teguran keras

terhadap RCTI, dalam hal siaran langsung rangkaian prosesi pernikahan aurel dan atta halliinter yang membajak frekuensi publik. KPI sebagai lembaga independen yang mewakili publik seharusnya tidak pasif membiarkan siaran langsung tersebut tayang atau mendapat laporan dahulu baru dievaluasi. Regulasi yang tertuang dalam P3SPS sudah cukup jelas, sehingga KPI bisa lebih proaktif dan tegas untuk melarang siaran langsung tersebut ditayangkan. Di tengah situasi bangsa yang berjuang menghadapi wabah covid-19, media penyiaran yang menggunakan frekuensi publik masih punya tugas berat untuk memberikan tayangan yang lebih informatif dan edukatif supaya masyarakat bisa menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. (\*)